



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Setengah Hati Digitalisasi Pelayanan



Pelayanan Prima



Apakah yang dipikirkan saat mendengar frasa ‘pelayanan publik’? Menurut ilmuwan, pelayanan publik didefinisikan: segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah.

Dengan demikian, aktivitas pelayanan publik merupakan keniscayaan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu bahkan yang mendasari mengapa setiap individu membutuhkan kehadiran *government* (pemerintah) agar dapat

memenuhi hajat banyak orang. Dalam arti lebih luas, para pemangku kebijakan memiliki kewajiban melayani.

Pertanyaannya seperti apa pelayanan publik yang terjadi saat ini? Sudahkah memberikan pelayanan yang prima atau dalam bahasa lain, *excellent service*? Melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat sehingga terjadinya simbiosis mutualisme.

Oleh karena itu, pada edisi kali ini redaksi majalah Cirebon Katon mencoba mengupas kondisi terkini pelayanan publik yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Kami mencoba rangkumnya dan menyajikannya berdasarkan narasumber dan fakta-fakta lapangan mengenai pelayanan sejak tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Kami senantiasa menunggu masukan, saran dan kritik dari seluruh pembaca budiman. Kita berharap kehadiran majalah ini selalu memberi informasi segar dalam setiap bulan. Selamat membaca Cirebon Katon!

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Siska Karina, MH
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Dra. Puti Amanah Sari
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Supardi • Kustano • Muiz • Amir

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi :

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Pelayanan Publik yang Berbelit

9 | Junaedi:
Perlu Inovasi Pelayanan Digital



16 | KILAS

Tinjau Kondisi TPS Mertapadakulon



20 | PUBLIKA

Jalan Guwa Lor Menuju Kaliwedi Amblas



22 | LENSA

Tradisi Nadran
Perwujudan Rasa Syukur Nelayan



24 | PROFIL

Drs H Sucipto MM
Sempat Menguli Karena Gagal Seleksi
Perguruan Tinggi

26 | Handi Eko Prasetyo S.Kom, MM
Bukan Atlet Tapi Demen Banget Olahraga

28 | DINAMIKA

Komisi I Minta Awasi Ketat Aset Desa

30 | Komisi III Soroti Kerusakan Jalan Ki Bagus Rangin

32 | Konsultasi Pendirian Badan Rehabilitasi Narkotika

34 | Drs H Subhan:
Raperda Kepemudaan Segera Dibahas



36 | POTENSI

Dulunya Kumuh, Kini Bersiap Jadi Wisata Desa



38 | DESA

Sutawinangun
Segera Hadirkan Pelayanan Digital

Pelayanan Publik yang Berbelit

Warga mengeluhkan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon yang dianggap lamban. Buruknya manajemen pelayanan, ditengarai menjadi penyebab banyaknya penyimpangan. Mengapa terjadi?



Belum juga matahari meninggi, Panji sudah memanaskan motornya. Hari itu, ia berencana menuju kantor kecamatan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) baru. Di usianya yang menginjak 27 tahun, kehilangan E-KTP sejak 2019 membuatnya sangat kewalahan. Ia bahkan merasa kesulitan saat ingin mendapatkan vaksin hingga melamar kerja.

“Karena enggak ada E-KTP, saya hanya kerja sampingan dengan menjadi tukang panjak kesenian burok yang sewaktu-waktu. Itu pun kalau memang lagi musim nikahan atau hajatan. Kalau enggak saya kadang nganggur,” ucap Panji.

Sesampainya di kantor kecamatan, Panji pun

langsung diterima oleh petugas pelayanan E-KTP. Panji diminta untuk menginstal aplikasi Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (SINTREN) di gawai miliknya dan mendaftar sendiri.

“Kalau enggak salah itu awal tahun 2021, saya juga membawa surat kehilangan dari Polsek, tapi kata petugas kecamatan langsung registrasi dulu di aplikasi SINTREN. Jujur saya belum paham dan belum tahu caranya,” ungkap Panji.

Panji pun mengalami kesulitan saat melakukan registrasi. Ia mengeluh karena *loading* aplikasi memakan waktu lama, dan aplikasi tiba-tiba berhenti.

“Kata petugas kecamatan, ikuti saja instruksi dari aplikasi. Saya coba berkali-kali ikuti saat sudah



di rumah, tapi lama dan malah mental kembali ke beranda awal," keluhnya.

Hal tersebut pun diaminkan oleh Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Pangenan Sopiayah. "Jangankan warga, kami dari petugas saja sering mengalami eror. Jadi memang harus sabar," ujarnya.

Pada akhirnya Panji memutuskan meminta tolong pada perangkat desa untuk mengurus cetak ulang E-KTP. Panji pun diminta membayar agar E-KTP bisa segera dicetak. Ia pun tak punya pilihan lain karena sedang membutuhkannya.

"Saya tahu pembuatan E-KTP tidak dipungut biaya. Tapi karena saya sedang butuh, dan teman sama tetangga juga pernah mengalami ini, jadi saya ikhlas membayar untuk cetak ulang E-KTP," jelas Panji.

Cerita lainnya dialami Cahyadi, warga Desa SR, di kawasan Cirebon timur. Ia harus memba-

yar sejumlah uang saat membuat akta lahir untuk putra bungsunya yang baru lahir.

"Ada petugas desa yang meminta saya untuk bayar kurang lebih Rp 250.000 untuk administrasi," ungkapnyanya kepada Cirebon Katon.

Harga tersebut dikatakan Cahyadi, sebagai ganti penyelesaian pembuatan akta baru dan biaya antar langsung ke rumah. Cahyadi pun tak menolak. Baginya, nilai itu tak sebanding bila ia harus menunggu mengurusnya sendiri.

"Saya tidak mau ambil pusing karena pengen biar cepat jadi, jadi saya bayar saja," tuturnya.

Namun demikian, alih-alih akta lahir segera jadi, Cahyadi tetap harus menunggu selama 3 bulan. "Saya enggak tahu kenapa tetap lama padahal saudara saya kalau bayar katanya akta lahir itu bisa cepat," imbuhnya.

Berbeda halnya dengan Zulkifli, warga Desa Pabuaran Lor. Setelah menikah pada 2021, Zul-

kifli berinisiatif membuat kartu keluarga (KK) baru saat membutuhkan BPJS untuk biaya persalinan istrinya.

Pria 25 tahun itu pun menyambangi kantor Desa PBL, untuk mengajukan pembuatan KK baru. Seperti kelaziman, ia pun tak lupa menyiapkan uang sebagai tanda terimakasih untuk petugas desa yang akan mengurusnya.

"Sebenarnya petugas desa tidak meminta, tapi di sini sudah terbiasa seperti itu. Setiap pembuatan E-KTP atau KK kami memberikan Rp 25.000- Rp 50.000 sebagai uang rokok gitu," kata Zulkifli.

Sementara itu, Rizky Firmansyah, pria 29 tahun warga Kabupaten Kuningan, justru harus apes setelah ia mengajukan pemindahan E-KTP miliknya. Rizky harus dipaksa membayar ratusan ribu untuk mengurus kepindahannya di Desa KCL, kawasan Cirebon timur.

“Saya diminta bayar Rp 250 ribu untuk pindah E-KTP jadi Cirebon supaya cepat jadi katanya, tapi ternyata tetap juga lama,” kata Rizky.

Baik Panji, Cahyadi, Zulkifli dan Rizky merupakan sebagian warga Kabupaten Cirebon yang merasakan betapa sulitnya mendapatkan kebutuhan publik secara cepat dan gratis tanpa adanya biaya tambahan. Pungli hingga praktik gratifikasi pelayanan publik bukan kabar baru dalam birokrasi tak terkecuali pemerintah daerah (pemda).

Sepanjang tahun 2021 misalnya, Ombudsman RI mencatat, jumlah laporan masyarakat terbanyak mengenai pungli dan gratifikasi mengarah terjadi di level pemda sebanyak 7.186 laporan atau 40 persen dari total laporan.

Ombudsman RI menilai, tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik masih rendah. Hal tersebut tentu berlawanan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang membebaskan negara untuk memenuhi kebutuhan publik.

Selain itu, UU No 25 Tahun 2009 Pasal 28 mengatakan, penyelenggara pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka. Sementara untuk pembuatan KK atau e-KTP sebagaimana poin a, paling lambat 14 hari setelah pemohon mengajukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79 A juga menjelaskan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya sama sekali.



Larangan pemungutan biaya yang dimaksud yakni untuk pembuatan dokumen kependudukan: kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak, termasuk E-KTP.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori mengatakan manajemen pelayanan publik di Kabupaten Cirebon sudah seharusnya segera dibenahi. Pasalnya, ia sering kali mendapat keluhan dari banyak warga mengenai lambannya pelayanan administrasi kependudukan.

Menurutnya, pentingnya mengurai mengapa proses pembuatan kebutuhan administrasi publik menjadi lama mencegah terjadinya pungli maupun gratifikasi.

“Sekarang kalau kita lihat bagaimana proses gratifikasi pelayanan, lahir karena warga berpikir dengan uang akan cepat.

Lambat laun itu kan jadi budaya sampai sekarang. Kalau tidak dikasih justru aneh dan bahkan di beberapa kejadian cenderung memaksa. Makanya harus kita urai. Apakah lama itu proses dari Disdukcapil ke kecamatan atau memang pendistribusian yang bermasalah,” ujarnya.

Hasan mengungkapkan, pembuatan E-KTP, KK maupun akta kelahiran seharusnya bisa lebih cepat. Pelayanan yang lambat tersebut dinilai terjadi karena manajemen data dan sistem administrasi di Disdukcapil belum berjalan optimal. Akibatnya cara konvensional tetap dilakukan dan menyebabkan celah pungli terbuka.

“Harusnya maksimal hanya beberapa hari untuk cetak KK, KTP dan administrasi publik lainnya. Tiga hari sudah paling ideal, tinggal Disdukcapil harus punya inovasi agar bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat,” pungkas Hasan. •Par

Target Selesaikan Pelayanan di Kecamatan

Pemkab Cirebon berupaya agar pelayanan publik kependudukan semakin cepat akan memastikan pelayanan dapat selesai di tingkat kecamatan. Bagaimana langkahnya?



Kebutuhan mendasar pelayanan warga di Kabupaten Cirebon seperti e-KTP, KK, IMB, akta cerai dan akta kematian dilanda segudang penyimpangan.. Prosesnya lama hingga berbulan-bulan. Di luar itu proses percetakan masih dilakukan di tingkat dinas.

Meski demikian, Kasi Identitas Penduduk Disdukcapil Kabupaten Cirebon Endang membantah jika pembuatan e-KTP maupun KK menjadi lama melebihi waktu tiga hari.

“Kita perlu lihat kenapa bisa terjadi. Kita menduga e-KTP yang lama terbit disebabkan karena ada masalah antara kecamatan dan pemohon. Bisa saja ada saja masalah data, atau pihak kecamatan yang tak segera mengirim ke aplikasi,” jelasnya.

Pembuatan e-KTP idealnya hanya membutuhkan tiga hari terhitung pemohon melakukan perekaman di kantor kecamatan dengan tanpa ada pungutan biaya.

“Dan kalau sudah, hanya butuh waktu 1 x 24 jam data perekaman akan masuk aplikasi Sintren. Besoknya bisa langsung dicetak dan lusa pihak kecamatan sudah bisa mengambil dan mengirim ke pemiliknya,” katanya.

Endang menduga, sebagian warga yang mengalami lamanya e-KTP maupun KK terbit, disebabkan ada beberapa kendala. Pertama, pemerintah kecamatan terkadang tak segera mengirim data pendaftar ke aplikasi Sintren atau kuota kecamatan dalam sehari sudah penuh.

“Misalnya hari itu ada 40 pendaftar, maka data



20 pendaftar sisanya dikirim besok. Kalau besoknya ada banyak lagi yang mendaftarkan, maka akan didaftarkan lusa dan seterusnya,” ungkapnya.

Kedua, lamanya warga menerima e-KTP lantaran pihak kecamatan tidak segera mengambilmunya di Disdukcapil.

Saat ini, bahkan ada 3.850 pengurusan e-KTP yang masuk aplikasi Sintren namun belum segera dicetak. Mulai dari pendaftar pemula, perubahan data identitas hingga cetak ulang karena hilang.

Endang pun tak menampik masih suburnya praktik pungutan liar (pungli) dalam pembuatan administrasi kependudukan. Bahkan masih banyak warga yang rela merogoh kocek hingga ratusan

ribu agar e-KTP bisa cepat jadi.

Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Cirebon Yendri Apriadi pun menegaskan jika pembuatan akta kelahiran sama sekali tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Disdukcapil tengah membangun integritas aparaturnya agar bebas dari praktik pungli. Untuk itu, Yeni mengaku akan menindak tegas pegawainya apabila terbukti melakukan pungli dalam kegiatan pelayanan catatan sipil.

“Kita ingin membuat zona integritas yang aman dari pungli. Apabila terbukti melakukan pungutan, kita akan menindaknya dengan tegas,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pembuatan akta kelahiran, kata Hen-

dri, langsung bisa didapatkan melalui kecamatan maupun Disdukcapil. Prosesnya bisa selesai dengan 2 hari.

“Setelah melengkapi pendaftaran, pemohon akan mendapatkan registrasi untuk pengambilan,” kata dia.

Namun sejauh ini, sering kali pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh pemerintah desa. Meski tak dilarang, Yeni mengingatkan agar sebaiknya warga dapat mengurus sendiri dengan datang langsung ke Disdukcapil.

Untuk memudahkan warga mendapatkan pelayanan publik, Disdukcapil Kabupaten Cirebon menargetkan pada tahun 2022 pelayanan pencetakan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat dilakukan langsung di kantor kecamatan. Sehingga pencetakan akta kelahiran, kartu identitas anak (kia), akta kematian hingga e-KTP tak perlu ke Disdukcapil.

“Sekarang sudah ada 3 kecamatan. Sisanya 13 kecamatan kita targetkan akan mulai berjalan di bulan Juli. Alatnya sudah ada. Tinggal selesaikan nota kesepahaman dengan kecamatan untuk tanggung jawab pemeliharannya,” ujarnya.

Endang mengatakan, Kabupaten Cirebon juga telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terpusat. Sistem ini diklaim memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) maupun surat pindah.

“Masyarakat yang sedang berada di luar domisili tetap dapat mengurus dokumen Adminduk. Misalnya warga Bandung yang sedang berada di Cirebon, bisa mengurus dokumen kependudukan di kecamatan setempat,” pungkasnya. •Muiz

Junaedi: Perlu Inovasi Pelayanan Digital

Junaedi berpendapat, dari pada harus membuat mal pelayanan publik sebaiknya Pemkab Cirebon fokus memfungsikan kecamatan menjadi garda terdepan pelayanan dengan inovasi digital yang memudahkan.



Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi mengatakan, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kabupaten Cirebon dinilai rendah. Padahal pelayanan publik merupakan tanggung jawab prioritas yang seharusnya menjadi pekerjaan pemerintah daerah.

“Itu sejalan sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berkeajiban menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang prima dan menjadi skala prioritas tugas pemerintah,” ujarnya.

Namun, alih-alih mendapatkan pelayanan publik yang prima, kata Junaedi, dalam praktiknya justru mendapat sederet catatan. Terutama berkai-

tan pelayanan kependudukan dan pencatatan yang kerap terjadi pungutan liar (pungli).

Para warga yang membuat e-KTP, KK maupun akta kelahiran misalnya, ditawarkan dengan dua pilihan; tanpa biaya dengan waktu lama, atau berbayar dengan iming-iming durasi cepat.

Pada tahun 2020, Satgas Saber Pungli Jabar, untuk kedua kalinya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pegawai Disdukcapil Kabupaten Cirebon yang terlibat pungli. Ia pun mengingatkan, jika Pemkab Cirebon akan serius membenahi pelayanan publik, harus ada ketegasan memerangi pungli tanpa pandang bulu.

“Jangan kasih toleransi kepada internal yang

terlibat praktik itu. Semua harus satu komando bahwa pola itu harus dihilangkan. Sehingga pemkab, kecamatan sampai desa punya kebulatan bersama. Sebab adanya pungli karena ada peran pemerintah yang justru memfasilitasi,” jelas Junaedi.

Meski Pemkab Cirebon telah merotasi jabatan struktural pegawai Disdukcapil dengan wajah baru, kata Junaedi, bukan berarti dianggap berhasil memutus mata rantai pungli. Politisi Fraksi PKS itu menilai, merotasi jabatan terhadap pegawai yang bermasalah bukanlah solusi jangka panjang.

“Cenderung blunder, faktanya sampai sekarang sekalipun sudah ada rotasi pembuatan dan pembaharuan e-KTP saja masih lama sekali sampai berbulan-bulan. Sekalipun titipan dari Komisi I, masih tetap lama. Apalagi masyarakat yang mengusahakan sendiri,” jelasnya.

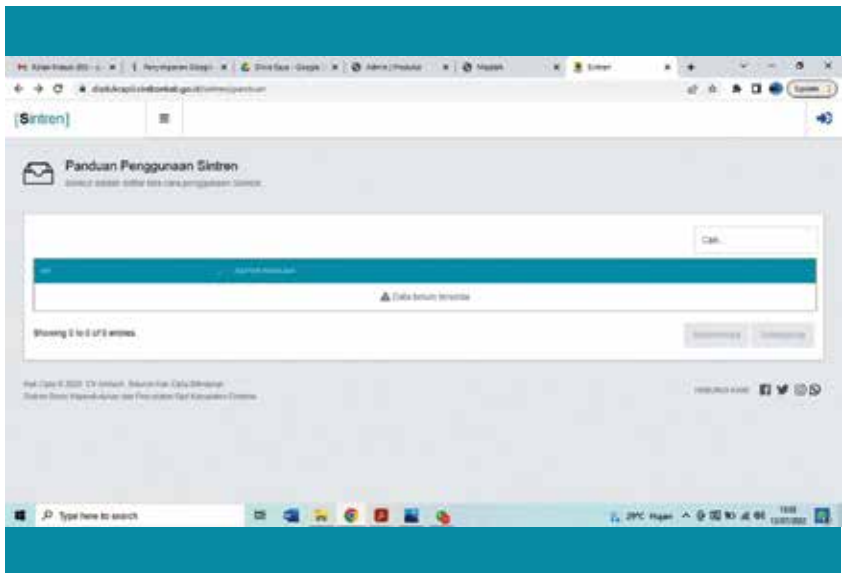
Ia pun meragukan, Disdukcapil telah mengevaluasi secara menyeluruh agar pelayanan publik semakin meningkat. Sejauh ini yang terjadi sebaliknya, masyarakat yang kerap mengadakan lamanya pembuatan KTP, KK maupun akta seolah dibuat layaknya bola pimpong.

“Katanya persoalan dari desa. Desa disuruh kecamatan. Kantor kecamatan juga mengoper lagi ke Disdukcapil. Begitu sebaliknya,” ungkap Junaedi.

Ia pun mengkritik inovasi digital yang dilakukan Disdukcapil melalui aplikasi *Sintren* yang justru semakin memperburuk pelayanan. Promosi dengan melombakannya dianggap hanya mengikut tren.

Aplikasi yang seharusnya memudahkan, faktanya menambah pelayanan semakin menyusahakan karena ketidaksiapan sistem.

“Orang harus menginput



atau mendaftarkan pagi-pagi. Alasannya karena pendaftar terlalu banyak. Saya enggak yakin juga persoalan utamanya seperti itu. Jangan-jangan karena sistem aplikasinya yang belum siap. Terbukti sekarang aplikasi *Sintren* sering eror,” kata dia.

Konsep digitalisasi pelayanan publik itu seharusnya menciptakan keefektifan. Misalnya dengan tidak sentralistik. Sejauh ini, proses pelayanan hanya dilimpahkan kepada dinas atau

pemerintah daerah. padahal, bisa dilakukan dan selesai di tingkat kecamatan.

“Jangan semua harus di dinas. Kita punya kantor representasi kantor daerah yakni kecamatan. Bagaimana menjadikan kecamatan menjadi garda terdepan pelayanan publik,” jelas Junaedi.

Adanya program pelayanan terpadu administrasi kecamatan (PATEN) yang sudah lama diluncurkan untuk mengurus kebutuhan publik dari Izin Mendirikan



Bangunan (IMB), e-KTP, KK, akta perceraian dan sebagainya nyatanya hingga kini tidak berjalan.

“Padahal itu bagus kalau dipraktikkan benar. Saya yakin kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan meningkat. Sayangnya saat ini kecamatan tidak punya kewenangan hanya jadi simbol kepanjangan pemda,” ujarnya.

Rencana Pemkab Cirebon mendirikan Mal Pelayanan Publik pada 2022 ini juga dinilai

bukan solusi tepat. Junaedi mengatakan, perlu kajian yang detail. Ia khawatir mal pelayanan publik justru akan bernasib serupa seperti mal-mal pasar yang telah bangkrut karena kehadiran pasar digital dan retail modern.

“Sekarang mal-mal besar yang lahir tahun 90 marak tutup. Itu kan karena warga cukup belanja di mal kecil (retail modern) selain belanja daring. Pengen beli itu datang saja ke Alfamart misalnya. Enggak perlu jauh-

jauh,” kata dia.

Oleh karenanya, Junaedi menegaskan, sebaiknya Pemkab Cirebon fokus agar pelayanan publik bisa selesai di tingkat kecamatan dari pada harus mendirikan mal yang belum tentu akan diterima masyarakat. Sebaliknya, perlunya inovasi pelayanan publik berbasis digital yang berorientasi memudahkan.

“Ngapain juga kalau terobosannya inovatif, akan tetapi pada penerapannya menyusahkan. Akhirnya seakan-akan setiap pemda berinovasi susah dijalankan. Dan pada akhirnya warga lebih memilih menggunakan jalur lain dan muncul praktik pungli,” tandasnya.

Selain itu, tak kalah penting agar pelayanan publik semakin meningkat, Pemkab Cirebon harus memastikan SDM pegawai memiliki integritas dan profesional. Junaedi berharap penerapan merit sistem pegawai bisa dilakukan untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita sering melihat orang pintar tetapi integritasnya maling. Jadi dua ini penting, termasuk SDM pegawai. Kalau sekarang belum bekerja optimal di dinas tertentu sudah dirotasi. Apalagi tak sesuai dengan kapabilitasnya. Itu yang harus segera dibenahi,” jelasnya

DPRD Kabupaten Cirebon senantiasa mendorong, agar Pemkab Cirebon segera berinovasi. Meski penggunaan aplikasi tertentu merupakan instruksi pusat, bukan berarti meniadakan inovasi pelayanan.

“Kalau sekarang saya *search* di internet, kabupaten atau kota dengan indeks kepuasan pelayanan publik yang muncul bukan Kabupaten Cirebon. Ini jadi pekerjaan rumah bersama,” pungkasnya. •Suf

Belajar dari Banyuwangi

Pelayanan Cepat dengan Smart Kampung

Setelah punya program Smart Kampung, pelayanan publik dari tingkat hulu hingga hilir di Kabupaten Banyuwangi menjadi mudah dan cepat. Bagaimana caranya?



Banyuwangi menjelma menjadi daerah yang begitu luar biasa. Terbaru, daerah berjudul *The Sun Rise Of Java* ini menerima penghargaan kabupaten terinovatif se-Indonesia. Prestasi ini bahkan sudah keempat kali sejak pertama dinobatkan Kemendagri pada 2018.

Prestasi yang diraih bukan tanpa sebab. Banyuwangi dinilai berhasil melakukan berbagai inovasi

tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik hingga inovasi program. Salah satunya program Smart Kampung yang merupakan layanan desa berbasis daring dengan pendekatan teknologi informasi.

Saat ini program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi telah diterapkan di 189 desa. Alhasil, di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari misal-



nya, telah mampu memfasilitasi kebutuhan dasar warga dari persyaratan SKCK, KK, e-KTP, akta kelahiran, akta kematian, Surat Pernyataan Miskin (SPM) dan surat pindah nikah melalui website yang disediakan pemerintah desa.

Sementara di Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi juga menerapkan pelayanan administrasi daring serupa. Para warga tak perlu repot ke kantor hanya cukup mengaksesnya menggunakan gawai yang terhubung koneksi internet.

Adanya program smart kampung tersebut berbagai layanan administrasi di desa dapat diselesaikan dengan cepat. Pembuatan administrasi semisal SPM, yang dulunya memakan waktu 6 hari, kini dipangkas hanya 6 jam.

Masyarakat cukup mengurus kelengkapan persyaratannya secara online melalui website desa yang tersedia. Bagi masyarakat

yang belum paham, bisa datang ke kantor desa. Nantinya, akan ada staff operator smart kampung.

Program Smart Kampung disambut baik oleh masyarakat. Salah satunya, Rahmat, Petani Desa Cluring yang merasa senang karena saat membua e-KTP bisa rampung hanya beberapa hari. Prosesnya pun tidak rumit dan bisa selesai di tingkat desa.

“Kalau dulu prosesnya sampai berbulan-bulan dan harus bolak balik (ke Disdukcapil). Sekarang cukup datang ke kantor desa dan membawa persyaratan, tidak sampai seminggu e-KTP jadi,” ujarnya, dikutip dalam Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul Dampak Implementasi Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi.

Selain pelayanan publik, berbagai urusan daerah yang masuk dalam program Smart Kampung yakni tata kelola pemerintahan, keuangan, kesehatan, pendidikan, pariwisata,





sosial, hingga pertanian dan peternakan.

Apa yang dicapai Pemerintah Bayuwangi sejauh ini tidak datang begitu saja. Prosesnya dimulai sejak Abdullah Azwar Anas menjabat Bupati Banyuwangi periode 2010-2015. Dalam kepemimpinannya, ada beberapa kebijakan sebelum terbitnya program Smart Kampung.

Pertama, perekrutan SDM pemerintah yang berdasarkan meritokrasi. Pemkab Banyuwangi menyadari mengelola pemerintahan berbasis digital merupakan kebutuhan yang pasti.

Dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Azwar sapaan akrabnya, meminta secara khusus kepada panitia seleksi

untuk membuka formasi lulusan IT. Mereka disiapkan untuk bertanggungjawab terhadap berbagai program berbasis IT serta bertugas melatih, menyiapkan SDM di level kecamatan dan Desa.

Azwar bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelola IT smart kampung dengan durasi waktu yang ditentukan. Menurutnya, mengelola pemerintahan berbasis IT tidaklah singkat, sehingga perlu kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.

Kedua, penataulangan kebijakan insentif. Langkah tersebut guna memastikan ide-ide inovatif seperti program Smart Kampung berjalan baik. Pemerintah Banyuwangi menyadari, ide-ide

inovatif tidak akan berjalan lancar bila tidak ada benefit yang profesional.

Terakhir, komunikasi politik yang jalan. Tersedianya akses internet sampai desa membuat Bupati Azwar Anas selalu hadir dalam kegiatan pemerintah. Meskipun tidak melulu hadir secara langsung, namun Azwar senantiasa menyempatkan datang secara daring melalui aplikasi daring berbasis rapat.

Dalam pertemuannya, ia seringkali berdiskusi secara intens dengan berbagai pihak dan legislatif terkait segala kebijakannya. Terutama mengenai perkembangan program smart kampung yang tengah dijelankannya.

• Muiz

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Tinjau Kondisi TPS Mertapadakulon

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Desa Mertapadakulon, Kecamatan Astanajapura mengalami overload yang menyebabkan sampah meluber dan berhamburan hingga ke rel kereta api. Hal itu disebabkan karena desa yang tak memiliki TPS di sekitar Kecamatan Astanajapura, juga membuang sampah di TPS tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Muhamad Luthfi menjelaskan, saat ini DPRD Kabupaten Cire-

bon tengah menggodok rancangan perda sampah yang akan mengatur salah satunya soal kewajiban desa menyediakan TPS. Selain itu berkaitan pembangunan TPA Karangwareng.

“Nanti perda sampah yang sebentar lagi kita sahkan, akan mengatur satu desa wajib satu TPS. Kita juga berharap kehadiran TPA 2 di Karangwareng akan memitigasi TPS desa *overload* seperti sekarang,” jelasnya.



Pembukaan Perdana SMAN Tengahtani

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Muhamad Luthfi bersama Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina, menghadiri pelepasan siswa kelas IX SMP N 1 Tengahtani. Kegiatan ini juga beriringan dengan dibukanya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perdana SMA Negeri 1 Tengahtani untuk tahun ajaran 2022-2023.

Luthfi dalam sambutannya mengapresiasi lang-

kah yang dilakukan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah menyeriusi pendirian SMA di Kabupaten Cirebon.

“Kami di DPRD melalui Komisi IV, pernah meminta agar KCD menginisiasi pendirian SMA untuk kecamatan blank zonasi. Dan kami bersyukur pada tahun ajaran ini ada 2 SMA yang didirikan yakni SMA N 1 Tengahtani dan SMA N 1 Depok,” ungkapnya.



Penyerahan Sertifikat Tanah Program PTSL

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Muhamad Luthfi menghadiri kegiatan penyerahan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon di Kantor Kuwu Desa Karangwangi, Kecamatan Depok.

Ratusan sertifikat tanah untuk warga Desa Karang-

wangi diberikan secara gratis melalui program PTSL. Sebelumnya para warga yang mengajukan PTSL, telah lebih dahulu mendaftar dan diseleksi panitia PTSL dari BPN.

“Kita mengapresiasi karena kehadiran program sertifikat tanah gratis ini telah mampu memberikan banyak manfaat bagi pemilik tanah dan tentunya mendorong kepastian hukum,” ujar Luthfi.



Rakor Pembukaan Tahapan Pemilu 2024

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi beserta Forkopimda turut menghadiri rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi persiapan dan kesiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Dr Sopidi mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menyosialisasikan kepada seluruh pihak dan masyarakat jika tahapan pemilu telah dimulai.

"Tahapan pertama adalah perencanaan anggaran dan penyusunan regulasi. Memang tahap ini

paling lama. Lalu tahapan terdekat adalah pada bulan Juli, KPU akan mulai melakukan membukan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024," ujarnya.

KPU Kabupaten Cirebon telah mengajukan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp 159 miliar. Meski demikian anggaran tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cirebon dan akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk *sharing* kemampuan anggaran.



Jalan Guwa Lor Menuju Kaliwedi Amblas



Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Zainal (32) asal Desa Guwa Lor, Kecamatan Kaliwedi. Saya ingin melaporkan kondisi struktur beton penyangga Jalan Bandara yang menghubungkan Desa Guwa Lor menuju Desa Kaliwedi amblas kurang lebih sepanjang 15 sampai 20 meter.

Akibatnya separuh badan jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Ditambah lagi, kondisi jalan tersebut tidak mendapat fasilitas penerangan jalan yang memadai.

Selain mengganggu kenyamanan, warga juga resah akan risiko tindak kriminal yang berpotensi menyasar pengendara sekitar, dikarenakan jalan tersebut jauh dari pemukiman. Saya berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon segera mengatasi masalah ini agar kejadian yang tak diinginkan bisa dicegah. Terutama perbaikan jalan amblas yang sangat dibutuhkan.

Terimakasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan.
(Zainal/Pedagang/Guwa Lor)

Tindak Pengendara Motor di Bawah Umur

Assalamu'alaikum wr wb

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara motor diharuskan mereka yang berusia dewasa. Namun hal itu tak terjadi pada realitanya. Masih banyak ditemui para pengendara motor yang berusia di bawah umur.

Keberadaan pengendara motor di bawah umur sering kita jumpai dan mendominasi jalanan sekitar. Pun tak jarang, ada sebagian dari mereka cenderung berkendara secara ugal-ugalan. Namun begitu, yang sangat disayangkan adalah ketika fenomena tersebut dibiarkan begitu saja.

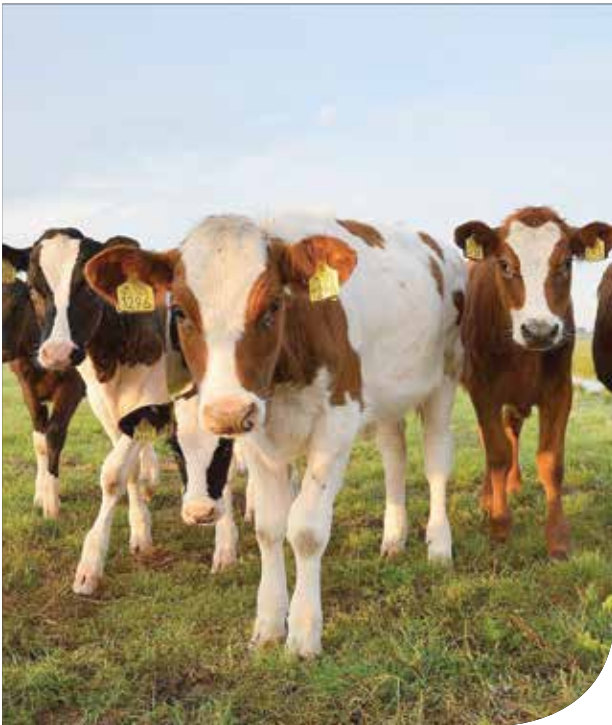
Banyak orang tua terlalu membebaskan anaknya berkendara tanpa memperhatikan faktor keselamatan. Untuk itu, saya berharap perlu adanya penegakan hukum yang lebih intensif lagi untuk mendisiplinkan para pengendara motor yang berusia di bawah umur.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Syifa/Karyawan/Lemahabang)



Awasi Penyebaran Penyakit PMK Hewan Ternak



Assalamualaikum wr wb.

Baru-baru ini, masyarakat Cirebon digegerkan dengan kabar ratusan ekor sapi yang terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Virus yang sering menginfeksi hewan berkuku belah tersebut telah menjangkit sedikitnya 700 ekor sapi pada pekan kedua ini.

Selain meresahkan khalayak, omzet para penjual daging pun ikut terimbas. Banyak pihak khawatir momentum hari raya Iduladha yang biasanya membawa keberuntungan bagi para penjual daging akan berdampak sebaliknya.

Angka penyebaran PMK diketahui meningkat drastis ketika sapi dari luar daerah mulai masuk ke Cirebon. Meski pemerintah telah mengambil tindakan, akan tetapi usaha tersebut kurang memberi hasil signifikan. Menurut saya, perlu ada regulasi untuk mengatur peredaran hewan dari luar daerah yang lebih tegas lagi. Kenakan juga sanksi tegas bagi pihak yang masih nekat menjual hewan tak sehat agar ada efek jera.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Husni/Pedagang/Palimanan)

Warga Keluhkan Pelayanan RSUD Arjawinangun

Assalamualaikum wr wb

Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang saya hormati. Saya Sandi (bukan nama sebenarnya) asal Desa Pangurangan. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bercerita mengenai kualitas pelayanan di RSUD Arjawinangun yang kurang mengedepankan etika dalam melayani pasien.

Saya sedikit terkejut ketika mendapati beberapa oknum pegawai rumah sakit yang cenderung acuh dan galak saat menangani kebutuhan pasien maupun pengunjung. Perlakuan tersebut sangat jauh dari semangat etika pegawai yang seharusnya melayani dengan sepenuh hati.

Saya berharap, DPRD Kabupaten Cirebon dapat mengevaluasi kinerja para pegawai yang berdinass di lingkungan RSUD Arjawinangun, mengingat apa yang saya alami merupakan kondisi riil.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

(Sandi/Cirebon/Mahasiswa)





Tradisi Nadran Perwujudan Rasa Syukur Nelayan

Baru juga matahari meninggi, ratusan warga sudah lebih dahulu memadati bantaran sungai. Mereka bersiap menaiki perahu. Sebagian lainnya, tetap menunggu di bibir pantai. Menunggu perahu utama pembawa kepala kerbau berlayar.

Tak mengenal usia, seluruh lapisan masyarakat dapat menyaksikan maupun mengikuti tradisi tahunan nelayan ini. Sedekah laut atau akrab disebut Nadran, kerap ditemukan di masyarakat pesisir. Salah satunya di pantai utara Cirebon, Desa Gebang Ilir.

Bagi para nelayan, nadran menjadi keharusan yang telah diwarisi turun-temurun. Semata-mata dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat tuhan melalui alam.

Mereka berdoa, agar tuhan senantiasa membuka jalan rezeki dengan melimpahkan ikan-ikan di lautan dan melindungi mereka saat berlayar. •Soy



Drs H Sucipto MM

Gagal Seleksi PTN, Sempat Jadi Kuli

Keinginannya berkuliah di kampus yang diidamkan harus padam karena Sucipto tak lulus seleksi. Ia pun sempat menguli terlebih dahulu demi mencukupi kebutuhannya. Bagaimana kisahnya?

Menjadi anak petani desa tak membuatnya bercita-cita rendah. Sejak remaja, Sucipto telah berkeinginan menempuh pendidikan hingga tingkat tinggi di kampus ternama.

Saat masih duduk di bangku SMA, Sucipto bukanlah tergolong murid yang pandai. Ia siswa biasa yang hanya berhobi olahraga.

Pasca lulus SMA, ia pun memberanikan diri mendaftar di dua perguruan tinggi: akademi keperawatan dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun Sucipto tak lulus seleksi.

Setelah mendapat kabar ia tak lulus di dua perguruan tinggi idamannya, Sucipto memilih banting setir terlebih dahulu untuk membiayai kehidupannya dengan menguli.

"Ya waktu saya dapat kabar tidak lulus, dan ongkos sudah menipis, saya harus jadi peladen kuli dulu di Bandung untuk menyambung hidup," kenangnya menceritakan.





Suatu hari saat ia tengah sibuk menguli, Sucipto bertemu teman lamanya asal Indramayu yang akan mendaftar di sekolah kedinasan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang. Sucipto pun disarankan agar ikut mendaftar. Sempat menuai perdebatan panjang karena keraguan, Sucipto pun luluh dan terbujuk.

“Akhirnya saya ikut daftar tes bareng teman saya. Dan saat pengumuman tiba saya dikabarkan lulus sementara temen yang mengajak saya tertolak,” ungkapnya.

Bak kejatuhan bulan, semula Sucipto benar-benar tak percaya. Ia bahkan harus melihat berulang kali papan pengumuman untuk memastikan namanya tertera.

“Saya bahagia banget dan karena lulus saya berhenti jadi kuli. Saya pulang untuk minta restu ke orangtua dan mendaftar

ulang,” jelasnya terharu.

Singkat waktu, se usai menoreh gelar di IPDN dan menjadi abdi negara, tahun 1988, Sucipto pun ditugaskan menjadi staf pemerintahan. Tak berselang lama, Sucipto dirotasi membantu pelayanan di kantor Kecamatan Beber.

“Lalu saya dipindahkan lagi jadi Kasi Pemerintahan. Pada tahun 1989 saya dinas di IPDN menjadi instruktur hingga tahun 1991,” tutur pria kelahiran Desa Bongas Lor, Indramayu itu.

Menjadi instruktur di kampus almamaternya, Sucipto sangat bangga dan senang. Karena ia benar-benar mengagumi instruktur.

“Saya sangat bangga karena di zaman itu fisik saya benar-benar masih prima, berbeda dengan sekarang yang mulai melemah seiring bertambahnya usia,” ujarinya.

Bernama lengkap Drs H Sucipto MM itu bahkan sempat ditawarkan menjadi dosen tetap di IPDN namun ia menolaknya. Akhirnya ia pun dikembalikan ke Cirebon.

“Kalau saya masih di IPDN mungkin sudah jadi profesor atau doktor. Temen temen saya sudah banyak yang jadi doktor,” jelas Sucipto.

Karirnya di Cirebon dianggap moncer. Sucipto malang melintang menjadi Camat dari Pangenan, Pasaleman, Depok, Pangguragan, Kedawung, Plumbon, Astanajapura dan Ciwaringin. Sucipto juga sempat berdinasi di Inspektorat dan pernah menjabat sekretaris Disnaker Kabupaten Cirebon.

Barulah se usai purna tugas menjadi camat Plumbon, pada tahun 2018 ia dialihkan untuk membantu tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dengan menjadi Kabag Perundang-undangan dan Persidangan.

“Sejak awal 2018 saya ke DPRD menjabat Kabag Perundang-undangan sampai sekarang. Mungkin karena belum ada yang layak lagi,” guraunya terkekeh

Selama bertahun-tahun menjadi ASN, Sucipto mengungkapkan pelajaran yang dapat ia ambil sebagai motivasi hidup. Ia benar-benar belajar tentang kesabaran dan bagaimana menerima keadaan apapun dengan tetap bersyukur. Baginya orang baik harus siap jika nanti tersisihkan.

“Harus ikhlas dengan kondisi kita. Kalau kita orang baik, maka kita harus siap tersisihkan dan siap ditempatkan di manapun. Orang benar bukan siap menang. Semakin kita benar semakin kita diuji kesabarannya. Dan terakhir kita tidak perlu dendam dengan siapapun,” pungkasnya. •Kus



Handi Eko Prasetyo S.Kom, MM

Sadari Kecil Hobi Olahraga

Eko begitu menyukai olahraga sejak berada di bangku SD. Terbukti ia tak pernah absen bergabung dengan komunitas olahraga hingga kini. Bagaimana kisahnya?

Berbicara soal olah tubuh, Eko memiliki perjalanan panjang saat muda. Kegemarannya dalam dunia olahraga sempat membawanya meraih berbagai kejuaraan.

Sejak masih duduk di bangku SD, pemilik nama lengkap Handi Eko Prasetyo itu begitu menyukai sepakbola dan tenis. Hampir setiap sore, Eko kecil, tak absen bermain sepakbola di lapangan Arjawinangun.

“Waktu masih SD saya ikut sekolah sepakbola bahkan menjadi kapten tim. Saya juga bermain tenis dengan alat seadanya,” kenangnya menceritakan.

Semasa SMP hingga SMA, tak lupa Eko juga bergabung di klub basket dan futsal. Namun di masa itu olahraga terpopuler adalah tenis dan sepakbola. Bersama teman sejawatnya, ia pun mengikuti berbagai lomba kejuaraan.

Menurutnya, setiap cabang olahraga yang ia geluti memiliki keunikan masing-masing. Tenis misalnya, membuat dia bisa dekat dengan kalangan elite. Sementara futsal dan basket memberi peluang ia bisa berkomunikasi dengan kalangan muda. Dan sepakbola adalah cara untuk bergaul dengan semua kalangan.

Kegemarannya terhadap olahraga terus dilanjutkan hingga ia menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini, Eko menjabat sebagai Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Eko pun bergabung dengan komunitas olahraga Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sampai sekarang masih aktif bukan hanya karena hobi, tapi memang untuk menjaga kesehatan sekaligus silaturahmi dengan para penggemar olahraga lainnya,” jelasnya.

Bersama timnya, Eko mengaku beberapa kali telah ikut turnamen dan menjuarai belasan lomba tingkat wilayah 3 Cirebon.



“Waktu tahun 2017 tim saya pernah juara 3 di tenis yang diadakan Polresta Cirebon. Di tahun 2019 tim futsal saya juga pernah juara 1 saat ikut lomba di Kabupaten Kuningan,” akunya.

Bagi Eko, olahraga merupa-

kan tempat untuk silaturahmi dengan teman-teman dan mengenal orang baru. Selain itu, olahraga mampu menjadi sarana seseorang dapat berkomunikasi tanpa harus melihat pangkat maupun jabatan sosial.

“Saya berpikir demikian, kalau kita ketemu orang dalam kehidupan biasa, tentu jabatan itu menjadi pembatas. Tapi kalau kita berolahraga bareng semua sederajat dan guyub,” tuturnya.

Setiap akhir pekan, Eko tak luput akan melakukan rutinitasnya bermain tenis di lapangan BKPSDM Sumber bersama para ASN dan militer. Sementara di hari Rabu, jadwal ia akan bermain sepakbola di lapangan Rangajati Sumber.

“Kalau sudah berolahraga pikiran begitu menyenangkan. Semua orang tak lagi memiliki status kedudukan sosial, karir. Semuanya menyatu menjadi tim. Itu alasan saya benar-benar menyukai dunia olah tubuh ini,” terangnya.

Beberapa prestasi olahraga yang berhasil ia dapatkan saat muda, kini hanya menjadi bahan cerita yang akan terus dikenang.

Di usianya saat ini, Eko menggeluti olahraga sebagai wadah silaturahmi dengan sejawatnya dan sebatas menjaga kesehatan tubuh.

Meski demikian, tak banyak yang tahu, jika Eko sempat bercita-cita terlebih dahulu menjadi seorang pelaut. Mimpi itu lahir karena keinginannya berkeliling dunia. Eko sempat terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi militer Cirebon. Hanya saja ia tak menuntaskannya.

“Pernah banget pengen jadi pelaut dan pernah sekolah di Akademi Maritim Cirebon (AMC). Tapi, mungkin takdir berkata lain, saya justru lulus sarjana komputer dan magister manajemen hingga ada peluang CPNS saya masuk pemerintahan,” jelasnya.

Saat ini, Eko pun tengah fokus menjadi abdi negara di jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. •Par

Komisi I Minta Awasi Ketat Aset Desa

Diduga aset desa tak seluruhnya diserahkan kuwu lama, Komisi I minta Camat Karangreja hingga Inspektorat bantu selesaikan polemik aset Desa Karangreja. Seperti apa?



Sudah hampir enam bulan, Toyana Babiet, menjabat Kuwu Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala setelah terpilih pada Pilwu serentak 2021. Umumnya, setiap peralihan pemerintahan, maka segala aset desa akan diserahkan kuwu baru. Namun hal tersebut tak dilakukan di Desa Karangreja. Hingga kini Toyana tak menerima seluruh aset desa.

Toyana baru menerima satu unit kendaraan motor Honda C1, buku tanah desa dan stempel kuwu saja. Sementara aset desa seperti tanah kas desa dan tanah titisara belum juga diketahui keberadaannya.

“Ditambah alat kelengkapan kantor seperti komputer dan printer juga sudah rusak. Laporan keuangan juga masih belum jelas,” keluhnya. Akibatnya, pelayanan masyarakat di Desa Karangreja menjadi

terhambat.

Kondisi tersebut, kata Toyana, dikarenakan hingga kini, kuwu periode sebelumnya belum membuat laporan pertanggungjawaban. Bahkan surat terima jabatan juga belum ditandatangani kuwu sebelumnya.

Toyana telah meminta bantuan Pemerintah Kecamatan Suranenggala untuk memfasilitasi permasalahan tersebut. Namun, tampaknya Muspika Suranenggala juga mengalami kesulitan. Sehingga sampai saat ini belum membuahkan hasil. Karena itu ia berharap DPRD Kabupaten Cirebon dapat membantu menyelesaikan.

“Dalam permasalahan ini tampaknya Camat Suranenggala juga mengalami kesulitan. Saya berharap kunjungan DPRD Kabupaten Cirebon kali ini bisa menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Toyana,



saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Camat Suranenggala Masrukhin pun mengakui sulitnya mengembalikan aset desa terlebih pasca Pilwu.

“Memang aset-aset desa di sini banyak yang tidak ada. alat-alat kantor yang ditinggalkan dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan. Anggaran operasional desa pun tidak ada. Alhasil, kuwu terpilih Desa Karangreja seakan-akan bekerja kembali dari nol,” ungkap Masrukhin.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwany Indriyati menerangkan po-

lemik aset desa kerap terjadi di desa-desa setelah kontestasi Pilwu. Terlebih pemenang merupakan kuwu baru. Padahal, sekecil apapun aset desa yang dimiliki harus tercatat dan tidak boleh hilang.

Saat menggelar rapat dengan Muspika Kecamatan se-Kabupaten Cirebon usai pelaksanaan Pilwu kemarin, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon sebenarnya telah meminta kepada Muspika agar mengamankan aset-aset desanya. Namun, hingga kini persoalan aset desa selalu menjadi pekerjaan yang berulang.

Diah pun menyangkan tidak hadirnya peran Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Karangreja dalam mengawasi kinerja kuwu lama.

Diah meminta kepada Kuwu baru Karangreja untuk segera mendata seluruh aset desa, baik yang belum dikembalikan maupun yang belum diketahui keberadaannya. Kemudian membuat surat resmi yang ditujukan kepada pemerintah kecamatan tentang permohonan pengembalian seluruh aset yang diketahui tak dikembalikan kuwu lama.

Diah menegaskan, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon akan terus berupaya mengawal permasalahan tersebut hingga selesai. Meski demikian, ia meminta kepada Kuwu Toyana untuk tetap menjaga kondusivitas dan keamanan desa.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi menambahkan, Pemdes Karangreja harus membentuk tim penelusuran aset guna memastikan dan mengamankan keberadaannya. Lalu, hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa.

“Jangan lupa untuk legalitas terhadap aset tersebut, lakukan sertifikasi terhadap seluruh aset desa yang ada. Adapun untuk pencatatan aset di bagian Sekretariat Pemerintahan Daerah. Diharapkan perangkat desa bisa berkoordinasi langsung dengan Sekda,” katanya.

Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Cirebon juga berjanji akan melakukan pemeriksaan rutin aset-aset milik Desa Karangreja dalam waktu dekat. Setiap Jumat, Inspektorat membuka ruang konsultasi langsung. Dengan begitu, permasalahan aset pemerintah yang terjadi di Desa Karangreja bisa segera ditindaklanjuti. • **Muiz**

Komisi III Soroti Kerusakan Jalan Ki Bagus Rangin

Sudah berbulan-bulan warga mengeluhkan kerusakan jalan Ki Bagus Rangin, Komisi III minta Dinas PUTR segera prioritaskan perbaikan.



Jalan Ki Bagus Rangin Desa Susukan, Kecamatan Susukan mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibatnya jalan milik Provinsi Jawa Barat tersebut dilaporkan telah banyak memakan korban kecelakaan.

Sepanjang 4 kilometer hingga memasuki Desa Tangkil kondisi jalan dipenuhi lubang. Keadaan ini diperparah saat musim hujan tiba, lubang-lubang tersebut semakin menganga dan susah dilewati. Rusaknya ruas jalan Ki Bagus Rangin mengakibatkan aktivitas warga menjadi terganggu.

“Itu sudah parah mulai jalan Tegal Gubug sampai Wiyong. Sementara yang paling parah di depan Kantor Kecamatan Susukan itu sendiri,” ujar Carsono, Camat Susukan.

Carsono mengatakan, ia bersama warga sudah meminta Pemkab Cirebon untuk segera memperbaiki

ki, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Ia pun berharap kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon akan berbuah hasil. Pasalnya jalan Ki Bagus Rangin merupakan salah satu ruas yang ramai dilintasi warga karena menjadi jalan penghubung.

“Sekarang kondisinya semakin parah, mengingat jalan tersebut merupakan jalan yang kerap digunakan, tentu dengan kerusakan sepanjang itu membuat pengguna jalan terganggu dan terhambat. Dan tidak jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” tutur Carsono.

Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pun merasa prihatin dengan begitu banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan. Ia berharap Pemkab Cirebon dapat segera mengalokasikan anggaran perbaikan.

“Saya merasa prihatin karena di tahun ini banyak



ruas jalan di Kabupaten Cirebon yang juga rusak. Pemerintah Kabupaten harus gerak cepat untuk menangani hal ini, khawatirnya jika musim hujan jalan malah akan tambah tidak layak digunakan," kata Hermanto.

Oleh karenanya, Hermanto mendorong agar Dinas PUTR Kabupaten Cirebon segera menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, jalan tersebut masih menjadi kewenangan provinsi, namun tetap harus dijembatani

oleh Dinas PUTR.

"Memang ini bukan kewenangan Kabupaten Cirebon tetapi menjadi kewenangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Tapi kita ingin Dinas PUTR harus segera menjalin komunikasi untuk secepatnya menangani jalan yang rusak tersebut," tegas Hermanto.

Menurut Hermanto, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Infrastruktur jalan merupakan

salah satu pilar utama kesejahteraan umum dan prasarana dasar dalam pelayanan umum.

Oleh karenanya, Hermanto menegaskan, kerusakan jalan harus segera ditindak lanjuti karena merupakan kebutuhan penting masyarakat. Ia pun mengkritik langkah Dinas PUTR sejauh ini yang baru merealisasikan program peningkatan jalan tanpa perbaikan.

"Kita tahu sepanjang tahun ini baru ada peningkatan jalan. Kita berharap Dinas PUTR mulai cepat tanggap ketika ada jalan yang sudah rusak, jangan hanya peningkatan saja, karena kalau memang jalannya rusak lalu apa yang perlu ditingkatkan? Kami komisi III juga siap membantu apa yang perlu dikoordinasikan," tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon Iwan Rizki mengatakan kerusakan Jalan Ki Bagus Rangin telah diketahui sejak awal tahun 2022. Hal tersebut pun menambah daftar kerusakan jalan parah. Namun demikian, kemampuan anggaran Dinas PUTR justru berbanding terbalik.

"Memang banyak jalan yang perlu diperbaiki, tapi anggaran kita untuk tahun ini tidak cukup untuk menangani semua. Tahun 2022 hanya ada kegiatan pemeliharaan jalan dan peningkatan pada ruas jalan yang menjadi prioritas," ujar Iwan.

Meski begitu, Iwan akan menginventarisasi terlebih dahulu jalan rusak yang menjadi skala prioritas perbaikan. Ia pun berjanji akan berusaha meminta bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, agar perbaikan Jalan Ki Bagus Rangin bisa segera ditangani pada tahun ini. •Par

Konsultasi Pendirian Badan Rehabilitasi Narkotika

Hingga kini pembentukan BNNK Kabupaten Cirebon belum juga direalisasikan, Komisi I pun sambangi BNNK RI. Mengapa terjadi?



Rencana pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) untuk wilayah Kabupaten Cirebon hingga kini belum ada tindak lanjut. Padahal, keberadaan badan pencegahan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dirasa penting untuk segera didirikan.

“Di wilayah 3 Ciayumajakuning yang sudah terbentuk BNNK, ada Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Padahal kalau kita liat wilayah Kabupaten Cirebon lebih luas. Tapi justru kita belum punya dan masih tahap moratorium,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Rahman.

Ia mengatakan, penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Cirebon telah kronis dan meluas. Sehingga kebutuhan pembentukan BNNK di Kabupaten Cirebon sangatlah endesak. karena itu, ia meminta agar BNN RI segera mempercepat pembentukan BNNK.

“Kita berharap ada jawaban. Apakah tahun 2022 ini sudah bisa ditindaklanjuti atau masih tetap dalam tahap moratorium,” ujar Rohman.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro SDM Aparatur dan Organisasi Setkamtam BNN RI Ichlas Gunawan menyambut baik keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk BNNK.

Menurutnya, saat ini tidak ada wilayah di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba. Karena itu harus ada keseriusan dan keberanian dari pemerintah daerah untuk menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba.

Ia menjelaskan, telah berdiri 34 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan 173 BNN kabupaten dan kota. Pembentukan BNN hingga tahun 2025 sebanyak 334 BNNP dan 514 BNNK. Dengan target per tahun 39 BNNK akan berdiri.



Alasan hingga kini pembentukan BNNK Kabupaten Cirebon belum juga ditindaklanjuti, disebabkan karena penguatan kapasitas instansi vertikal BNN masih tahap penggodokan. Sebagaimana Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 2, penguatan kapasitas instansi harus diutamakan sebelum mengusulkan pembentukan instansi BNN baru.

“Penguatan kapasitas instansi vertikal BNN merupakan prioritas pertama yang harus direalisasikan dul. Jika hal itu tidak tercapai maka pembentukan instansi vertikal BNN tidak dapat

diproses,” ungkap Gunawan.

Begitu pun berkaitan penataan instansi vertikal, telah tertuang sebagaimana Surat Kepala BNN tanggal 20 Februari 2018 tentang pembentukan 70 BNNK/kota. Selain itu, Surat Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana tanggal 14 Mei 2018 tentang Penguatan Kapasitas Organisasi.

Oleh karenanya, Gunawan mengingatkan agar Pemkab Cirebon agar memastikan kesiapannya dalam proses pembentukan BNNK.

“Siapkan kebutuhan perlengkapan yang diperlukan untuk persiapan kapasitas instansi

terlebih dahulu. Jangan sebatas wacana dan sampai meja saja,” tegas Gunawan.

Ia menyampaikan, banyak hal yang perlu diperhatikan jika ingin membentuk BNNK. Mulai Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana hingga anggaran.

Untuk anggaran kegiatan kantor, minimal Rp 500 juta dan dianggarkan selama 5 tahun oleh APBD. Sedangkan sarpras tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Melainkan juga berupa perlengkapan kantor beserta kendaraan operasional kantornya.

“Kami akan meninjau langsung ke Kabupaten Cirebon jika Pemerintah Kabupaten Cirebon benar-benar serius ingin membentuk BNNK di wilayahnya. Apabila mengatakan perlu pembentukan BNNK tersebut maka persiapan terlebih dahulu dan harus siap melimpahkan kepada BNN,” kata Gunawan.

Sementara ini, ia menyarankan agar Kabupaten Cirebon bisa berkordinasi dan bekerjasama terlebih dahulu dengan BNNK Kota Cirebon.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan pun berharap BNNK Cirebon dapat segera direalisasikan. Pasalnya telah banyak generasi muda saat ini yang tersandung penyalahgunaan narkoba dan sangat membutuhkan tempat rehabilitasi bagi para penyandang.

Ia pun akan memastikan Komisi I mendorong alokasi anggaran untuk rencana pendirian BNNK. Sofwan juga mengaku siap berkordinasi dan bekerjasama terlebih dahulu dengan BNNK Kota Cirebon.

“Selama ini kita hanya tahu tempatnya, namun belum mengetahui prosedur pembentukan BNNK,” pungkasnya. •Soy

Drs H Subhan: Raperda Kepemudaan Segera Dibahas

Dukungan hingga pembinaan pemuda belum dilakukan serius karena tak adanya payung hukum yang kuat. DPRD Kabupaten Cirebon berjanji segera godok raperda kepemudaan.



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Drs H Subhan mengatakan, pentingnya mewadahi kreativitas pemuda agar ikut serta membangun daerah menjadi pekerjaan penting Kabupaten Cirebon. Pasalnya, ia seringkali mendapat kritik para pemuda tak mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Makanya melalui pertemuan ini kita berharap bisa menyinkronkan apa yang harus kita lakukan untuk para pemuda melalui masukan para kuuwu-kuwu dan masyarakat,” ujarnya saat mengisi kegiatan Wawasan Kebangsaan dengan tema Peran Pemuda dalam Demokrasi dan Persatuan Bangsa di Kecamatan Gebang.

Upaya meningkatkan peran pemuda, kata Subhan, dapat didorong dalam berbagai bidang, salah satunya olahraga. Sejauh ini, sejak pertama kali

menjadi legislator, Subhan banyak mendapat masukan mengenai kondisi olahraga dan atlet Kabupaten Cirebon yang dinilai memperhatikan.

Salah satunya berkaitan atlet-atlet Kabupaten Cirebon yang memilih untuk meninggalkan Cirebon karena tidak mendapat kesejahteraan yang layak.

“Itu kenyataan yang terjadi di banyak di cabang olahraga (cabor) seperti silat, sepakbola hingga belum lama atlet perbakin. Para atlet kita yang milih lari ke daerah lain karena tawaran yang menggiurkan,” ungkapnya.

Akibatnya, setiap kejuaraan pekan olahraga, justru kekurangan para atlet yang siap bertanding sehingga Kabupaten Cirebon memilih menyewa atlet dari daerah lain.

“Ini menjadi hal yang sering terjadi dan lucu. Jadi para atlet pembinaanya kurang sehingga ambil



dari daerah lain," jelasnya.

Oleh karenanya, ia berharap agar keseriusan membina para atlet mulai segera diperhatikan Pemkab Cirebon sejak dari desa. Sementara peran DPRD mendukung anggaran yang dibutuhkan.

"Kalau dari kami dewan dan pemerintah itu hanya bisa *support* anggaran dari masing-masing dinas terkait," jelasnya.

Selain itu pentingnya *reward* bagi atlet berprestasi saat berhasil mengharumkan nama Kabupaten Cirebon juga patut dicatat.

"Kalau di beberapa daerah lain ada yang dapat kerjaan dan uang. Nah kita juga harus

melakukan hal serupa," kata dia.

Selain itu, tak kalah penting optimalisasi organisasi pemuda sebagai wadah kreativitas juga harus didorong. Meski demikian, ia mengapresiasi geliat organisasi pemuda semisal karang taruna yang lebih baik sejak 10 tahun belakang.

Subhan mengatakan, saat ini ada dukungan anggaran untuk pemuda tapi kurang signifikan sehingga masih menjadi persoalan. Oleh karenanya ia akan mengupayakan lahirnya sebuah rancangan peraturan daerah (perda) tentang kepemudaan untuk menyeriusi langkah tersebut.

Raperda Kepemudaan direncanakan akan mengatur segala pembinaan tentang pemuda sehingga memiliki payung hukum yang kuat.

"Tidak hanya soal olahraga saja, tetapi apapun yang kaitannya menyangkut dengan pemuda semuanya harus bisa didukung dengan terbitnya aturan," ujarnya.

Dengan jumlah penduduk hampir mencapai 2,3 juta jiwa merupakan beban yang tidak ringan. Sementara pekerjaan rumah juga masih banyak yang harus dilakukan.

Saat ini kalangan pemuda tentu sudah berkembang dengan lahirnya era digitalisasi. Hal tersebut harus didukung sehingga dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Cirebon. Misalnya dengan memfasilitasi dan mendorong lahirnya para pelaku usaha baru sehingga menekan angka pengangguran.

Di luar itu, kehadiran pemuda dalam demokrasi dengan sadar politik juga tak ketinggalan. Ia berharap pemuda tidak boleh anti terhadap politik, dan sepatutnya harus terlibat dan menjadi bagian kelompok terdepan.

"Semua aspek kehidupan tidak ada yang lepas dari politik. Jadi peran pemuda juga tak boleh pasif atau justru menentang. Padahal politik itu sudah menjadi bagian dari demokrasi bangsa kita Indonesia," jelas Subhan.

Ia pun senantiasa menunggu masukan dan saran untuk dirangkum dalam raperda kepemudaan agar peran pemuda Kabupaten Cirebon akan benar-benar terasa.

"Kalau raperda sudah disahkan tentu perhatian pada kegiatan kepemudaan dengan dukungan anggaran dapat terwujud," pungkasnya. •Kus

Dulunya Kumuh, Kini Bersiap Jadi Wisata Desa

Balung kumuh yang awalnya tak berfungsi, kini tengah disulap menjadi destinasi wisata oleh Pemdes Playangan. Tak lama lagi akan segera dibuka. Seperti apa?



Semula warga Desa Playangan, Kecamatan Gebang, melihat balong di pinggir lapangan sepakbola hanya menjadi tempat kumuh yang dipenuhi semak belukar. Tak jarang warga sering kali menemukan ular di sekitar lokasi.

Hingga pada awal 2022, Pemerintah Desa (Pemdes) Playangan mulai membenahinya. Mereka melihat genangan air tersebut berpeluang menjadi salah satu wisata untuk meningkatkan pendapatan desa. Hal itu sejalan dengan harapan Pemdes Playangan, yang ingin segera menambah PADes.

Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bernama Pucuk Mekar, Pemdes Playangan mulai merealisasikan program rehabilitasi balong untuk diubah menjadi wisata perairan yang elok.

“Namun karena memang bertahun-tahun balong itu tidak dikelola, jadi banyak warga yang menanam pohon mangga dan sebagian membuat kandang kambing,” ungkap Kuwu Desa Playangan Sobirin.

Akibatnya, Sobirin harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan para pemilik pohon dan kandang tersebut. Meski sebenarnya lahan di sekitar perairan milik desa, Sobirin tidak menginginkan ada warga yang dirugikan sebab rencana rehabilitasi balong.

“Saya bersama Bumdes, akhirnya bernegosiasi dan kami sepakat untuk membeli pohon-pohon mangga yang tumbuh di atas tanah titisara. Sementara kandang kambing kita memindahkannya ke tempat lain,” tuturnya.

Setelah balong sudah keadaan siap, Pemdes



Playangan mulai merenovasinya dengan membersihkan dan memagarnya. Tak kurang anggaran Rp 100 juta telah dialokasikan Pmdes untuk program wisata balong.

“Pembangunan sudah 2 bulan kurang. Dana itu kita dapatkan dari kas Bumdes pada periode sebelumnya sejumlah Rp 34 juta dengan tambahan dana talangan hasil tanah bengkok milik saya,” kata Sobirin.

Alhasil, saat ini balong tersebut pun tampak terlihat bersih. Selain itu akses jalan juga lebih luas setelah adanya pelebaran dengan dilengkapi hiasan dekorasi bambu yang mengitarinya.

Rencananya, Pmdes Playangan akan membuat wisata air yang memiliki segmentasi beragam.

“Nanti kita ingin mengubah balongan ini menjadi wisata air yang dapat dinikmati anak-anak maupun orang dewasa. Kita juga akan buat tempat pemancingan dan kafe. Harapannya nanti dikelola para pemuda desa,” jelasnya.

Sobirin mengaku telah melakukan studi banding ke berbagai tempat wisata untuk mencari inspirasi dan mempelajari tata kelola wisata. Ia berharap, jika wisata air desa tersebut sudah dibuka resmi, para warga Desa Playangan dan seki-

tarnya tak lagi harus keluar jauh untuk berwisata.

“Kita sempat studi banding ke berbagai tempat wisata air di Kuningan, Indramayu dan Kota Cirebon. Saya pengen tahu apa saja yang perlu dipersiapkan dan membandingkan biaya masuk wisata air di tempat lain,” tutur Sobirin.

Meski disadari untuk membangun wisata air dibutuhkan dana yang besar, Sobirin optimistis akan terwujud.

“Sekarang di rumah saya ada yang sedang membuat perahu bebek. Insyaallah kita akan punya 5 perahu bebek untuk anak-anak hingga dewasa. Saya beli perahu bebek seharga Rp 9 juta. Itu belum menghitung biaya tukang,” ungkap Sobirin.

Sehingga, tak ayal pembangunan wisata tersebut seringkali tersendat karena kehabisan dana.

“Beberapa minggu lalu pembangunan terhenti karena dana kita habis. Makanya saya juga sedang mengajukan bantuan kepada Pemkab Cirebon. Kalau kita mengandalkan dana talangan terus itu tidak efektif dan itu bisa memperlama wisata ini jadi,” ujarnya.

Rencananya Sobirin akan menamakan Pesona Bahari untuk wisata balong tersebut. Sekalipun masih banyak yang perlu dipersiapkan sebelum dibuka secara umum. Namun ia memastikan Balong Pesona Bahari akan *launching* pada tahun ini.

“Karena ini wisata air, jadi saya menamakan Pesona Bahari. Meskipun masih banyak yang perlu dipersiapkan, tapi saya pastikan maksimal akhir tahun kita buka. Semoga bisa memberi dampak PADes bagi kita serta menggeliatkan usaha warga sekitar,” pungkasnya. •Par

Sutawinangun

Segera Hadirkan Pelayanan Digital

Pemdes Sutawinangun tengah berfokus mengakselerasi program berbasis teknologi informasi demi kemudahan informasi dan pelayanan publik. Bagaimana langkahnya?



Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Pemdes Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, saat ini tengah menggodok program 'Melek IT' untuk kebutuhan pelayanan atau informasi seputar desa berbasis daring. Hal tersebut bertujuan selain untuk pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan juga agar pelayanan publik dapat lebih efisien.

Program Melek IT yang sedang diakselerasi itu diren-

canakan akan tersinkronisasi dengan layanan aplikasi media sosial dan situs web sebagai basis utamanya. Program tersebut ditargetkan akan mulai berjalan pada awal 2023.

"Sekarang sedang kita persiapkan infrastruktur dan sdm perangkat desa," ungkap Dias Fakhnuritasari, Kuwu Desa Sutawinangun.

Dias mengaku program tersebut digagas dengan menggandeng Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK)

Kominfo untuk menyiapkan perangkat desa sebagai operator program. Sejauh ini progres pengerjaan program Melek IT sudah sampai pada tahap penginputan data pendukung dan tinggal menunggu kerjasama.

"Sudah selangkah lagi menunggu MoU saja," ungkapnya.

Saat disinggung mengenai besaran modal, Dias mengatakan, anggaran yang dikeluarkan tidak akan melebihi batas kewajaran. Ia memastikan akan menekan biaya seminim mungkin. Meski demikian, dengan anggaran minim, Dias optimistis akan membawa manfaat yang begitu besar.

"Tidak muluk-muluk, insyaallah modalnya tidak akan lebih dari Rp 20 juta saja," katanya.

Dengan digagasnya program Melek IT, diharapkan proses pelayanan publik nantinya tidak lagi mengandalkan cara konvensional yang sangat memakan waktu dan terkesan ribet. Sehingga kedepan masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membawa berkas persyaratan saat akan mengurus berbagai keperluan administrasi publik.

"Pada intinya program Melek IT ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Dan secepatnya akan kita *launching*," imbuhnya. •Mir

Bulak

Jadi Contoh Desa Bersih Sampah

Kolaborasi warga dengan pemerintah desa untuk menjaga lingkungan, menjadi faktor Desa Bulak kini bersih dari sampah. Bagaimana bisa?

Hamparan persawahan mengitari desa kecil yang terletak di perbatasan ini. Sungai bersih yang mengalir menjadi kunci suburnya tanaman padi.

Desa Bulak, Kecamatan Arjawinangun hanya berpenduduk sekitar 2 ribu jiwa. Rerata para warga berprofesi sebagai petani. Meski demikian, desa kecil ini dinilai berhasil menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah.

Keberhasilan tersebut, tak lepas dari komitmen Pemerintah Desa Bulak dan warganya dalam menjaga lingkungan. Setiap pekan, mereka secara bahu-membahu rutin kerja bakti mengangkut sampah ke tempat pembakaran.

“Soliditas dan kesadaran bersama menjadi faktor penentu wajah Desa Bulak hari ini. Kita rutin kerja bakti tiap minggu,” ujar Sekretaris Desa Bulak Mochammad Hadiawan.

Hadi, sapaan akrabnya, mengungkapkan, meski saat ini baru mampu membersihkan sampah, namun ia berencana akan mulai mengembangkannya ke tahap lebih jauh. Seperti pembuatan unit daur ulang atau bank sampah.

“Agar nantinya sampah yang dihasilkan tidak hanya berakhir di tungku pembakaran, tetapi



bisa dimanfaatkan untuk memperoleh pemasukan bagi desa maupun warga itu sendiri. Kita berencana lakukan itu kedepan,” ungkapnya.

Kiprah Desa Bulak dalam mewujudkan desa yang bersih, tak jarang menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejaknya. Tak sedikit desa yang berkunjung ke Desa Bulak untuk studi banding bagi daerah yang ingin mengentaskan masalah serupa.

Hadi mengatakan, apa yang pihaknya lakukan pada dasarnya sederhana, yakni niat serius dan komitmen bersama. Dengan

modal itu lingkungan bersih pun dapat terwujud. Selain itu tak kalah penting, adalah komitmen dan kesadaran bersama.

Ia pun berharap, semua masyarakat dapat terus mempertahankan soliditas dan kekompakan dalam merawat lingkungan. Karena tanpa semua itu, kebersihan lingkungan akan mustahil terwujud.

“Mudah-mudahan semangat ini bisa terus kita jaga dengan gotong royong memastikan lingkungan desa yang ramah dan bebas sampah,” pungkasnya. •Mir

Belawa

Akan Bangun Agrowisata Mangga

Pemdes Belawa ingin produksi mangga yang melimpah ruah dapat menarik wisatawan dengan berencana membangun agrowisata mangga. Seperti apa?



Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang, merupakan salah satu desa yang berada di sebelah selatan Kabupaten Cirebon. Dikenal dengan keberadaan wisata alam Cikuya Kura-Kura Belawa, nyatanya desa satu ini juga memiliki potensi lainnya yang tak kalah menarik di bidang perkebunan mangga.

Dari sektor perkebunan, Desa Belawa diketahui menjadi salah satu produsen mangga harumanis matang pohon atau mangga alpukat. Tak kurang dari 200 hektare kebun mangga berada di desa ini.

Kuwu Desa Belawa Deni Kusuma mengatakan, dalam setahun para petani mangga Desa Belawa bisa menghasilkan mangga hingga 1000 ton.

“Para petani di sini bisa panen berkali-kali dalam setahun,. Makanya bisa dikatakan Desa Belawa salah satu penghasil terbesar memproduksi mangga di Kabupaten Cirebon” ujar Deni.

Oleh karenanya, Pemerintah Desa (Pemdes) Belawa tengah berupaya membuat wisata dengan memanfaatkan potensi desa tersebut. Deni berencana, mendirikan sebuah gudang penampungan hasil panen mangga di

belakang wisata Cikuya. Selain itu, ia juga berencana membangun agrowisata mangga.

“Potensi sektor perkebunan di Desa Belawa sangat potensial sehingga layak untuk dikembangkan dengan membangun agrowisata. Jadi nantinya tidak hanya wisata Cikuya saja, melainkan ke depan agrowisata pertanian mangga juga bisa dinikmati para pengunjung,” tuturnya.

Di samping itu, melimpahnya produksi mangga, Pemdes Belawa juga berkeinginan membuka kran ekspor. Ia akan memfasilitasi para petani mangga agar bisa menjualnya hingga ke luar negeri. Pasalnya, Deni mengungkapkan mangga khas Belawa mampu bertahan hingga 3 minggu jika dikemas dan disimpan dengan panduan khusus.

“Kita sudah tahu cara mengemas dan menyimpan yang tepat agar mangga tidak mudah busuk. Kita akan segera menyosialisasikan kepada seluruh petani biar mangga bisa awet dan tahan lama,” ungkapnya.

Deni berharap, melalui ekspor dan agrowisata mangga, ekonomi masyarakat Desa Belawa akan semakin meningkat.

“Kita perlu berpikir lebih jauh untuk menggenjot ekonomi warga salah satunya dengan mengerjakan wisata berbasis desa,” tandas Deni. •Soy

Kreyo

Punya Mesin Pembakar Sampah Modern

Miliki mesin pembakar sampah modern, Pemdes Kreyo berkeinginan mengurai sampah sejak dari hulu. Bagaimana bisa?

Tak banyak tahu, jika Desa Kreyo, Kecamatan Klenganan, Kabupaten Cirebon tengah menjadi percontohan akibat keseriusannya mengelola sampah setelah kehadiran mesin canggih pembakar sampah.

Kuwu Desa Kreyo Rusdina mengatakan, kehadiran mesin pembakar sampah modern sejak April 2022 berangsur-angsur mampu mengurai masalah sampah yang semula tak terbendung.

“Dulunya kita benar-benar kewalahan karena TPS penuh dan sampah berserakan,” kata dia.

Mesin pembakar sampah tersebut diakui memiliki daya tampung hingga 4 ton sampah dengan sistem *incinerator*. Sampah-sampah yang menumpuk di rumah akan diangkat melalui gerobak yang telah disediakan Pemdes Kreyo. Dalam sebulan, setiap rumah akan membayar iuran Rp 10 ribu.

Meski demikian, Rusdina menuturkan, Pemdes Kreyo juga mengalokasikan anggaran senilai Rp 120 juta per tahun yang digunakan untuk membiayai program tersebut.

“Memang masih dalam tahap percobaan apakah Rp 120 juta ini bisa mencukupi atau tidak. Kita juga masih ada tim kuning pengambil sampah yang kita biayai dari iuran warga,” tutur Rusdiana.



Anggaran tersebut dialokasikan untuk menggaji 2 petugas pembakar dengan masing-masing Rp 1,5 juta per bulan, listrik, solar hingga perawatan mesin.

Namun begitu, Rusdina menjelaskan masih ada kekurangan yang membuat pekerjaan mesin ini belum optimal, karena tidak semua jenis sampah bisa langsung dibakar.

“Kalau sampahnya basah itu tidak bisa dibakar, jadi kita pilih. Kemudian yang masih layak kita jual kembali sehingga tidak semua sampah bisa dimasukkan

ke mesin. Kita berharap dengan keberadaan mesin modern itu sedikit bisa mengurai sampah,” jelasnya.

Selain upaya mengurai sampah, Pemdes Kreyo juga memiliki program infrastruktur. Di antaranya, pembangunan jembatan, Tanggul Penahan Tanah (TPT), pertanian hingga normalisasi sungai.

“Itu beberapa program kita yang saat ini sudah berjalan. Tetapi paling kita banggakan adalah program bebas sampah yang sudah dirasakan manfaatnya,” pungkas Rusdina. •Kus



Tol Pelayanan

Dalam sebuah kunjungan ke desa, seorang warga, sebut saja namanya Mang Casta, bercerita. Saya mendengarkannya dengan seksama. Meski sebenarnya kisah sejenis bukan kali pertama saya dengar. Tapi tetap saja selalu menggelitik.

“Kang, waktu saya ingin membuat KTP, prosesnya lama dan berbelit. Alasannya blangko kosong, antri, mesin cetak terbatas, macam-macam lah.... Katanya kalau pengajuan normal bisa tiga bulan, kalau bayar bisa sebulan, kalau mau jalan tol dua hari juga bisa, tapi bayarnya lebih mahal lagi,” begitu kurang lebih ia bercerita.

Tak hanya menggelitik sebenarnya, cukup menyekatkan juga. Bagaimana tidak, di era teknologi informasi, di tengah semangat zaman yang berubah begitu cepat, hal itu masih terjadi.

Hampir semua lini kehidupan kini sudah dimanjakan dengan kemudahan teknologi. Di bidang ekonomi, ada *e-commerce*, *e-banking*, dan *e-trading* yang sudah begitu akrab dengan masyarakat.

Pergerakan manusia dan barang pun sudah berbasis teknologi. Teknologi *geo information system* (GIS) dan *global positioning system* (GPS), seperti gmap dan waze, sudah lekat dalam keseharian. Bahkan gojek dan grab sudah memadukannya fungsi GIS dan GPS dengan transaksi ekonomi (*e-commerce*). Lagi-lagi, orang kampung pun sudah terbiasa dengan aplikasi ini.

Di bidang pendidikan sudah ada *e-learning*. Bahkan kini ada universitas yang hanya membuka kelas daring (*online*). Di bidang kesehatan sudah ada *e-doctor*. Dengan aplikasi orang sudah bisa berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan resep obat.

Di bidang pertahanan negara dan keamanan masyarakat pun sudah menerapkan teknologi informasi. Polisi siber beberapa kali diberitakan unjuk gigi mengungkap kejahatan. Ini sekaligus membuktikan bahwa kejahatan dan kemaksiatan pun sudah berbasis teknologi informasi.

Jika teknologi sudah semakin pintar (*smart*), masyarakat dan lingkungan pun demikian, bagaimana dengan pemerintahan? Bagaimana dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?

Jika kita sudah menerapkan *e-government*, tentu saja kisah Mang Casta di atas tak akan terjadi. Tidak ada lagi cerita pelayanan jalur normal, jalur arteri, dan jalur tol. Harusnya semua pelayanan adalah pelayanan jalan tol. Lancar, cepat, praktis, dan bahkan bisa gratis.

Pemerintah daerah di semua lini harus membuat tol pelayanan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, seperti KTP dan KK. Saatnyalah, pola pikir insan pemerintahan bertransformasi untuk terus meningkatkan pelayanan, bukan meningkatkan ‘pendapatan’ pribadi.

Saatnyalah organisasi pemerintahan berkomunikasi aktif dengan masyarakat sebagai pelanggan. Kepuasan masyarakat harus senantiasa diukur, dan dijadikan indikator kinerja. Masyarakat harus diberikan akses untuk menyampaikan keluhan. Mekanisme pelaporan disusun dan dilaksanakan dengan rapih dan konsisten, sehingga tersusun *standar operating procedures* (SOP) yang baku.

Tentu saja semuanya itu harus berbasis teknologi informasi. Sarana dan prasarana harus secara masif dibangun di setiap lini pemerintahan, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Harus ada satu data kemasyarakatan (*single data system*). Tak ada lagi kisah data tidak sinkron antar-lini atau antar-bidang pemerintahan.

Tak ada lagi kisah tidak ada blangko. Teknologi informasi menyediakan blangko yang tidak terbatas. Tinggal klik dan isi, kapanpun, dimanapun. Sehingga semua tol pelayanan pun tersedia untuk semua jenis layanan kemasyarakatan.

Tentu saja, juga tidak ada lagi diskriminasi pelayanan. Hanya yang berduit yang mendapatkan layanan prima. Jika semua tol pelayanan itu sudah tersedia, maka disitulah Cirebon Bahagia.



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI

Mengucapkan:



01 JUNE

Selamat Hari Lahir
PANCASILA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Selamat Hari Lahir



PANCASILA

1 Juni 1945 - 1 Juni 2022